



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI



Yogyakarta, 2 Desember 2010

**Fakultas Pertanian
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
2010**

ISBN : 978-602 – 98216- 0-4



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

TIM EDITOR :

Yanisworo WR, Tuti Setyaningrum,
Antik Suprihanti, Endah Wahyurini
Vini Arumsari

TIM PERUMUS :

Basuki, Djoko Mulyanto, Juarini, Mofit Eko P,
Nanik Dara Senjawati, Rukmowati B, S.Setyo Wardoyo
Sumarwoto PS, Siti Syamsiar, Sri Wuryani, Teguh Kismantoradji

Yogyakarta, 2 Desember 2010

Fakultas Pertanian
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
2010

Diterbitkan oleh:
Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta
Jl. SWK 104 Lingkar Utara Condongcatur Yogyakarta 55283
Telp : (0274) 486693, 487793
Fax : (0274) 487793

ISBN 978-602-98216-0-4



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN KETUA PANITIA	iv
SAMBUTAN REKTOR UPN "VETERAN" YOGYAKARTA	vi
DAFTAR ISI	viii
MAKALAH UTAMA	
1. DEVELOPING SUSTAINABLE AGRICULTURE : MALAYSIAN EXPERIENCE Sulaiman Hanapi, Cheksun Tawan, Isa Ipor dan Sepiah Muid	1
2. POTENSI PANGAN NUSANTARA DALAM DIVERSIFIKASI MENUJU MANDIRI PANGAN Murdijati Gardjito	13
MAKALAH PENUNJANG	
TOPIK I. KAJIAN AGRONOMIS	
1. INDUKSI PEMBUNGAAN TANAMAN JARAK PAGAR (<i>Jatropha curcas</i> L.) MELALUI INTENSITAS PENGAIRAN DAN PEMUPUKAN PHOSPHAT Ramdan Hidayat, Cholid Ridho, F. Daru Dewanti	I-1
2. RESPON TIGA VARIETAS KACANG HIJAU DENGAN APLIKASI PUPUK KANDANG AYAM DAN PUPUK P TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL Tri Harjoso dan Utomo	I-9
3. PERAN PUPUK NPK Dan PUPUK KANDANG DALAM MENINGKATKAN HASIL BAWANG MERAH Wahyu Widodo	I-16
4. PERTUMBUHAN DAN HASIL KACANG TUNGGAK DENGAN VARIASI PUPUK ORGANIK CAIR DAN PUPUK NPK Tutut Wirawati	I-21
5. UJI MULTILKASI GALUR HARAPAN KEDELAI BERBIJI BESAR > 14 gr/100 BIJI DI LAMPUNG TENGAH Amrizal Nazar	I-27
6. STUDI APLIKASI HERBISIDA OKSIFLUORFEN DAN PUPUK PELENGKAP CAIR PADA BUDIDAYA KACANG HIJAU Endah Budi Irawati dan Siwi Hardiastuti	I-32
7. PENGARUH PEMBERIAN KAPUR LIMBAH LAS KARBIT DAN JUMLAH BENIH PERLUBANG TANAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL KEDELAI Suyadi	I-40
8. ADAPTASI BEBERAPA VARIETAS UNGGUL KEDELAI DI KABUPATEN TULANG BAWANG LAMPUNG Dewi Rumbaina M, Nila Wardani, Yulia Pujiharti	I-49
9. KONSENTRASI TRIAKONTANOL DAN EM ₄ TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL KEDELAI (<i>Glycin max</i> (L.) Merrill) Rati Riyati dan Lucia Dwi A.H.	I-53

13	PERBAIKAN KUALITAS TANAH BEKAS PENAMBANGAN PASIR DENGAN MASUKAN TEKNOLOGI PEMUPUKAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI JAGUNG Dyah Arbiwati dan Abdul Rizal	IV-86
14	KANDUNGAN HARA DAN POTENSI DARI LIMBAH SERESAH JAGUNGUBI KAYU DAN KULIT KAKAO SEBAGAI PUPUK ORGANIK A.Makka murni, Rr. Ernawati dan Soraya	IV-92
15	REHABILITASI LAHAN KRITIS DENGAN TANAMAN KERANDANG Mulud Suhardjo	IV-97
16	PERAN BIOTEKNOLOGI TANAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI R Agus Widodo	IV-102
17	INDUKSI TUNAS UBIJALAR SECARA IN VITRO Rina Srilestari, Tutut Wirawati dan Ari Wijayani	IV-110
18	KAJIAN PEMBERIAN KAPUR DAN PUPUK KANDANG TERHADAP KETERSEDIAAN P ANDISOL DAN SERAPANNYA OLEH JAGUNG (<i>Zea mays L</i>) DI GONDOSULI. Lelanti Peniwiratri, Dyah Arbiwati dan Sari Budi Utami	IV-116

TOPIK V. KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

1.	PENINGKATAN PERAN KELEMBAGAAN PARTISIPASI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN Budi Widayanto	V-1
2.	SUBSTITUSI TERIGU DENGAN TEPUNG TEMPE DAN UBI JALAR SEBAGAI BAHAN MAKANAN BERENERGI TINGGI Rosanna Christiningsih	V-8
3.	REAKTUALISASI DIVERSIFIKASI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA DAN KEARIFAN LOKAL MENUJU KETAHANAN PANGAN NASIONAL Eko Murdiyanto	V-14
4.	DESAIN PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL MENUJU DESA EKOWISATA BERBASIS HUTAN RAKYAT Sutrisno	V-23
5.	MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI MELALUI DIVERSIFIKASI PANGAN DAN OTONOMI DAERAH Soeharto	V-32
6.	KERAGAAN PEMANFAATAN LIMBAH TERNAK SAPI UNTUK BIOGAS SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF DI TINGKAT RUMAH TANGGA TANI (Studi kasus di Primatani Kabupaten Batang) R. N. Hayati dan A. Choliq	V-39
7.	KAJIAN KETAHANAN PANGAN BAHAN POKOK PADA TINGKAT RUMAHTANGGA DAN REGIONAL SEBAGAI UPAYA MENUNJANG KEMANDIRIAN PANGAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Vini Arumsari	V-43

PENINGKATAN PERAN KELEMBAGAAN PARTISIPASI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN

***The improvement of participation institutional role
in realized to Food security***

Budi Widayanto

Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta

e-mail: budiwidayanto@Ymail.com

ABSTRACT

Food, poverty, and production areas are interacted and interdependent aspect. These three aspects can produce in boths are positive and negative synergy, so the strategy needs to be creation in the positive direction to support food security programs. Based on the data, 36 million people in Indonesia are in a state of food insecurity and 5.11 million highly food-insecurity. Associated with poverty, food commodities bigger role than the role of non-food commodities to the Poverty Line (GK) of 73.6 percent in 2009. While poor people in 2010 amounted to 64.23 percent who live in rural areas. Based on these data, the achievement of food security strategies should ensure the involvement of community participation capacity (aspects of poverty) and spatial (aspect of the production areas). Very specific aspects of the production area in producing food locally (cultural property), so the strategy must also be oriented consumption equal to production. While aspects of the capacity of participation as an effort to shift the paradigm shift from the domination of the government's role in empowering communities closer producing areas. For the successful achievement of food security need the right strategy with the creation of institutional participation. Aspect of participation and capacity building aspects of the production areas will accommodate the physical and socio-economic diversity of the community, and encourage the diversification of food on the basis of suitability, availability, sustainability, and local needs.

Keywords: Food security, institutional participation, the production areas

PENDAHULUAN

Pola pangan nasional yang mengandalkan pada beras merupakan akibat program yang kurang tepat, sehingga persoalan pangan tidak bisa lepas dari ketergantungan beras dan meminggirkan pangan nonberas. Disamping itu fluktuasi cadangan beras dapat mengganggu konsumsi nasional, ketika produksi beras mengalami pasang surut, bahkan pada kondisi tertentu ketiadaan beras akan mengakibatkan guncangan sosial ekonomi bahkan politik. Orientasi produksi pada beras secara nasional juga telah mengakibatkan pelemahan secara struktur dan kultur posisi komoditas pangan nonberas sebagai makanan pokok masyarakat lokal.

Makanan pokok lokal sebenarnya menjadi kekuatan kedaulatan pangan kita, tetapi justru tertabaikan dan tidak memiliki insentif pasar yang baik, sehingga tidak menarik untuk diusahakan. Hal ini terjadi akibatnya kultur bangsa kita yang menggunakan pendekatan sentralisasi dalam pengambilan kebijakan, sehingga membuat ketergantungan yang tinggi pada pemerintah. Lebih jauh persoalan ketergantungan beras dan lemahnya posisi pangan lokal telah menjadi kontradiksi dalam penentuan setiap kebijakan pangan. Disatu sisi banyak wilayah yang sudah berubah pola produksinya dari pangan lokal ke pangan beras, sehingga pangan lokal tidak memiliki pasar dan menjadi minoritas di wilayahnya. Sisi lain promosi kembali ke pangan lokal demikian gencar tetapi masih sulit merubah pola perilaku masyarakat untuk kembali ke pangan lokal. Fenomena yang lain, berkembangnya

persepsi masyarakat akan konsumsi pangan yang berorientasi pada makanan-makanan siap saji (fast food) yang kebanyakan menggunakan bahan baku import (terigu).

Ada persoalan yang perlu dirumuskan secara komprehensif untuk dicari solusinya, semangat untuk "mau dan mampu" diarahkan pada perubahan mindset masyarakat pada pola konsumsi pangan mandiri. Keberhasilan pola pangan mandiri secara tidak langsung akan menghasilkan permintaan dan penawaran pangan lokal. Selanjutnya akan menggairahkan usaha-usaha produksi di wilayah sentra produksi pangan lokal. Esensi pangan lokal merupakan bentuk kekayaan budaya, keanekaragaman yang terbentuk secara alamiah didasarkan pada ketersediaan bahan baku dan kebutuhan lokal, secara alamiah pangan lokal memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakatnya.

WILAYAH PRODUKSI

Keberhasilan revolusi hijau dengan program Bimasnya telah mendongkrak produktivitas subsektor tanaman pangan sehingga tercapai swasembada pangan (beras), tetapi subsektor tanaman pangan memiliki sifat yang rentan terhadap hama. Revolusi hijau juga memunculkan kesenjangan antar daerah/ kawasan padi dan nonpadi dan konsentrasi ini juga menyebabkan keterbelakangan pada pembangunan subsektor pertanian hortikultura (Loekman Soetrisno, 2002). Program revolusi hijau telah ikut menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi perkembangan pertanian khususnya budidaya tanaman nonpadi yang diusahakan oleh petani. Kondisi ini juga menyebabkan produksi pangan nonpadi menjadi tidak menarik, karena lahan dikonversikan untuk memenuhi keberhasilan produksi padi nasional.

Wilayah kita sangat luas dan memiliki karakteristik yang sangat heterogen, pangan lokal mempunyai kesesuaian dengan karakteristik lokal yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan energi bagi kehidupannya. Perubahan pola pangan yang berorientasi pada komoditas tertentu, misalnya beras dan makanan berbahan baku terigu khususnya, telah menjadikan juga kelumpuhan (dis-empowerment) suatu wilayah untuk menghasilkan produk pangan lokalnya.

Selain beras, pola pangan kita yang sangat tinggi terhadap produk berbahan baku terigu (mie-instan → Indonesia termasuk negara dengan konsumsi yang besar) turut memberikan kontribusi pada penurunan pasar pangan lokal, apalagi kita belum dapat menghasilkan gandum secara masal. Berdasarkan wilayah, masyarakat kita telah mengembangkan berbagai produk pangan lokal seperti ketela pohon, jagung, ubi jalar, sorgum, sagu dan itu sudah berjalan turun temurun. Secara wilayah, pangan lokal diusahakan oleh masyarakatnya, seperti sagu di Maluku, jagung di NTT, jenis umbi-umbian seperti ketela pohon, ubi jalar di berbagai wilayah Indonesia, meskipun beberapa wilayah terjadi pergeseran pola pangannya.

Sejalan dengan itu perubahan pengelolaan daerah yang berubah dari sentralisasi ke desentralisasi memberikan keleluasaan daerah untuk mengelola sumberdayanya. Dengan perubahan pola pengelolaan sumberdaya, daerah seharusnya mampu membuat terobosan kebijakan untuk mengembalikan dominasi pangan lokal, sebagai jawaban atas berbagai masalah kerawanan pangan, peningkatan pendapatan, dan optimalisasi sumberdaya wilayah menuju program ketahanan pangan daerah dan nasional.

Berdasarkan data dari Dewan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian RI dan World Food Programme (WFP), wilayah yang paling rawan adalah Papua dan Kalimantan, sedangkan yang paling makmur adalah Jawa dan sebagian Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa secara wilayah juga terjadi menurunnya nilai lokal akibat kebijakan pangan yang bias ke komoditi tertentu. Kesenjangan ini juga akibat pola pembangunan pertanian yang bias komoditas dan bias wilayah, karena memang komoditas padi misalnya, akan tumbuh lebih baik di Pulau Jawa dibandingkan pulau lainnya.

Padahal kekhasan komoditi yang diusahakan secara baik di tiap wilayah akan memberikan keunggulan wilayah, baik komoditas pangan atau nonpangan yang spesifik lokasi sebagai kearifan

lokalnya. Menurut Fachrurrozie Sjarkowi (2010) menyatakan bahwa ada tiga manfaat dapat dinikmati oleh daerah bersama warganya jika rancangan pewilayahan komoditi itu dipatuhi dan direalisasikan secara konsisten dengan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait. Ketiganya adalah sebagai berikut;

Mengangkat keunggulan komparatif sebagaimana tercermin dari efisiensi teknis (produktivitas) dan efisiensi harga (harga pokok) yang relatif lebih unggul dari pada apa yang terjadi di wilayah non-rekomendasi.

Mendorong kelangsungan perdagangan antar wilayah kabupaten, selain dari alur perdagangan konvensional antar desa dan kota khususnya ibukota provinsi, dan ini akan memperluas efek pelipatgandaan peredaran uang di daerah bawah.

Merangsang kebutuhan prasarana yang baik secara merata di semua bagian wilayah daerah administrasi, sekaligus merata pula kadar penggunaannya untuk keperluan transportasi komoditi, lalu peduli pula memeliharannya.

Wilayah dan komoditas spesifik lokasi memiliki hubungan yang erat, karena wilayah tertentu memiliki kemampuan tertentu untuk menghasilkan produk (pangan dan nonpangan) sesuai kemampuan alamiahnya.

KEMISKINAN

Komoditas beras sebagai orientasi konsumsi pangan juga berkaitan dengan kemiskinan, ada sebuah kontroversi bahwa kenaikan harga beras berpengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan. Ada yang berpendapat bahwa "kambing hitam" kemiskinan itu dianggap sebagai justifikasi untuk membuka liberalisasi perdagangan beras. Padahal kemiskinan banyak disebabkan oleh persoalan struktural dan pola pemilikan lahan, sehingga sangat sensitif terhadap harga gabah dan harga beras (Bustaniul Arifin, 2007). Hubungan kemiskinan dengan beras dapat dijelaskan dengan adanya ketergantungan akan produksi komoditi beras, petani selalu "dipaksa" untuk meningkatkan produktivitasnya tetapi petani sama sekali tidak menguasai tataniaga komoditas beras, selain itu juga kendala skala usaha petani yang terbatas (kepemilikan lahan cenderung sempit atau petani gurem).

Perubahan persepsi sebagian masyarakat kita terhadap pangan lokal dengan meninggalkan pangan lokal yang sudah sejak lama diusahakan, merupakan tindakan agar masyarakat dianggap lebih maju dan tidak terbelakang karena pola konsumsinya. Dengan perubahan pola tersebut, justru membuat tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap makanan-makanan yang tidak biasa diproduksi. Masyarakat terpaksa harus membeli produk pangan dengan harga yang lebih tinggi, dibandingkan jika masyarakat mampu menghasilkan produk pangan lokalnya. Kondisi ini terjadi di sebagian besar wilayah-wilayah yang dulu bukan merupakan basis produksi beras, misalnya di Nusa Tenggara Timur yang merupakan daerah produksi jagung, sekarang telah berubah pola konsumsinya ke makanan pokok beras, di Madura yang dahulu juga produksi pangan lokalnya jagung, juga berubah, di Gunung Kidul yang dahulu juga produksi ketela pohon dengan pangan lokalnya dari ketela pohon juga berubah ke pangan beras, dan di Fak-fak banyak masyarakat yang berubah dari makanan sagu ke beras.

Dengan beras sebagai orientasi utama peningkatan produksi pangan nasional, telah memarjinalkan kondisi petani terutama petani yang memproduksi pangan (beras). Dengan demikian membuat petani kita menjadi manusia yang seolah-olah terperangkap dengan sebuah pilihan usahanya. Menurut Pearse dalam Greg. Sotomo (1997), menyatakan;

- (1) Petani kecil merupakan kelompok marjinal karena keikutsertaannya dalam sistem sosial telah meletakkan mereka sebagai elemen yang dibuat tergantung tak berdaya sepenuhnya (a dependent powerless element);
- (2) Pilihan-pilihan petani ditentukan oleh pihak-pihak di luar petani;

- (3) Petani terasing dari jaringan-jaringan informasi aktual mengingat keterbatasan kemampuan kognitif mereka, sistem transportasi yang belum sempurna, dan perbedaan kultur serta posisi inferior dalam interaksi pasar.

Menurut BPS, kemiskinan dapat dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Berdasarkan metodenya menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM).

Berdasarkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM) dan dibedakan atas dasar Kota dan Desa, persentase penduduk miskin dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2009-
Maret 2010

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (juta)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
Perkotaan					
Maret 2009	155909	66 214	222 123	11,91	10,72
Maret 2010	163077	69 912	232 989	11,10	9,87
Perdesaan					
Maret 2009	139331	40 503	179 835	20,62	17,35
Maret 2010	148939	43 415	192 354	19,93	16,56
Kota+Desa					
Maret 2009	147339	52 923	200 262	32,53	14,15
Maret 2010	155615	56 111	211 726	31,02	13,33

Sumber: Diolah dari data Susenas Panel Maret 2009 dan Maret 2010.

Dari Tabel 1, dapat dijelaskan bahwa penduduk miskin lebih banyak yang berada di perdesaan dari pada penduduk yang berada di perkotaan. Selain itu kemiskinan masih didominasi oleh produk makanan dibandingkan bukan makanan.

Dari aspek kebijakan dengan memperhatikan indikator komoditi makanan dan indikator wilayah, maka sangat strategis membangun dengan memberikan investasi yang lebih besar ke wilayah desa. Investasi di desa akan memberikan dampak yang sangat besar, selain membangun daerah sekaligus memberikan peluang masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatannya sehingga akan mengurangi kemiskinan. Selain itu pada umumnya komoditas yang dikembangkan di wilayah perdesaan adalah komoditas pangan, sehingga antara kemiskinan, wilayah komoditas dan ketahanan pangan dapat secara serentak dibangun bersama.

KELEMBAGAAN PARTISIPASI

Kelembagaan merupakan sebuah organisasi dan kontrol terhadap pemanfaatan sumberdaya (manusia dan natural), pemanfaatan sumberdaya diorientasikan pada perolehan kondisi yang optimal. Dalam pengertian tidak ada seorangpun yang mendapatkan kerugian dari sebuah pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya. Salah satu ciri kelembagaan yang baik menurut Acemoglu

(2003) dalam Ahmad Erani Yustika (2006), adalah memberikan kesempatan yang sama setiap individu untuk aktivitas ekonomi dalam bentuk partisipasi kapasitas individu.

Keleluasaan setiap individu dan masyarakat secarta luas untuk meningkatkan kapasitas partisipasinya memberikan indikasi perluasan ruang publik untuk membangun dirinya, kelompoknya, dan sekaligus wilayah tempat mereka berada. Dalam pengertian luas, bahwa keleluasaan tersebut akan memberikan kesempatan yang luas pula bagi potensi wilayah untuk berkembang, menghasilkan produk terutama pangan lokal untuk dikonsumsi secara lokal maupun di ekspor ke wilayah lain. Keterlibatan publik yang lebih banyak dalam pengambilan keputusan, terutama kebijakan yang menyangkut eksistensinya merupakan paradigma baru yang harus didorong implementasinya.

Akibat modernisasi modern (Revolusi Hijau) telah menyebabkan petani kita bodoh (Loekman Soetrisno, 2002). Hal ini dapat dilihat dari ketergantungan masyarakat tani kita terhadap permainan harga produk-produk revolusi hijau (sarana produksi), jika terjadi perubahan harga maka akan terjadi penyesuaian terhadap penggunaan input produksi. Namun demikian, masih banyak petani kita yang memiliki kepekaan sebagai kekayaan sosial yang tinggi dengan bertahan dengan usahatani yang menggunakan bibit lokal (padi). Inisiatif setiap orang harus dikomunikasikan dan menghasilkan kreatifitas kelompok/ masyarakat dalam mencari inovasi baru mengelola sumberdaya lokalnya.

Bentuk keterlibatan, dapat di kelompokkan dalam partisipasi individu, kelompok/ masyarakat dan partisipasi kelembagaan (kelembagaan formal dan nonformal) mulai tingkat rumah tangga, desa, dan kelembagaan yang ada di atasnya. Salah satu kebiasaan yang sudah lama hilang dalam kebudayaan masyarakat tani kita misalnya, Forum Desa atau Rembug Desa perlu kembali diaktifkan untuk menampung aspirasi sebagai bentuk adopsi pelibatan partisipasi, pembangunan kembali Lumbung Desa. Selain itu intensifikasi program-program pembangunan, seperti Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), lembaga yang baru (PKK, Posyandu) dengan fokus pangan lokal dan teknologi pengolahan pangan, memperluas program Desa Mandiri Pangan.

Berdasarkan capaian Ketahanan Pangan pada Gambar 1., Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi, bahwa ketahanan pangan harus dimulai dari unit terkecil yaitu tingkat individu, tingkat rumah tangga (RT) dan tingkat masyarakat. Pemerintah dalam hal ini dapat memberikan fasilitasi untuk membuat masyarakat mampu untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Fasilitasi dapat berbentuk pendampingan masyarakat untuk meningkatkan produksinya, teknologi pengolahan pangan, dan penelitian-penelitian untuk pengembangan pangan lokal.

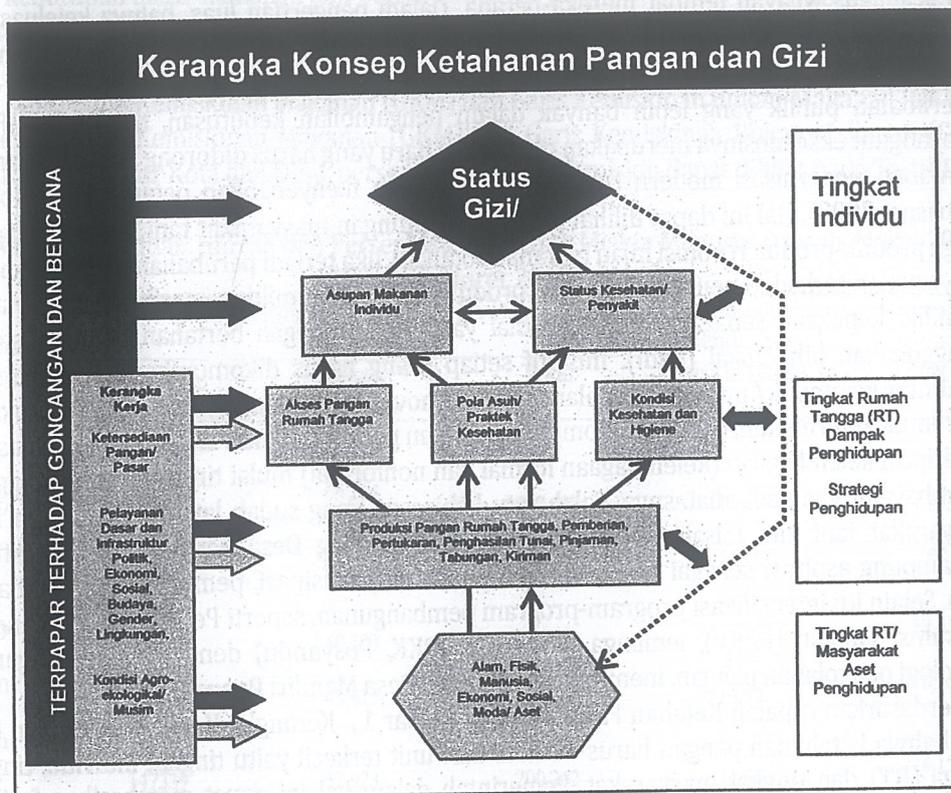
KETAHANAN PANGAN DAN PERAN KELEMBAGAAN PARTISIPASI

World Food Summit (1996) ketahanan pangan didefinisikan sebagai "Ketahanan pangan terjadi apabila semua orang secara terus menerus baik secara fisik, sosial, dan ekonomi mempunyai akses untuk pangan yang memadai/cukup, bergizi dan aman, yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan makanan untuk hidup secara aktif dan sehat". Sedangkan pada Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2009, analisis pemetaan dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai ketahanan dan kerentanan pangan dan gizi.

Ketahanan pangan dapat tercapai jika; (1) setiap individu setiap saat mempunyai akses terhadap pangan baik secara fisik maupun secara ekonomi, dan (2) pangan tersebut harus cukup, aman, dan bergizi guna memenuhi kebutuhan energi untuk menjalankan kehidupan yang aktif, sehat, dan produktif. Problem utama pangan secara umum adalah jumlah pertambahan penduduk dan ketersediaan lahan yang semakin terbatas untuk berproduksi.

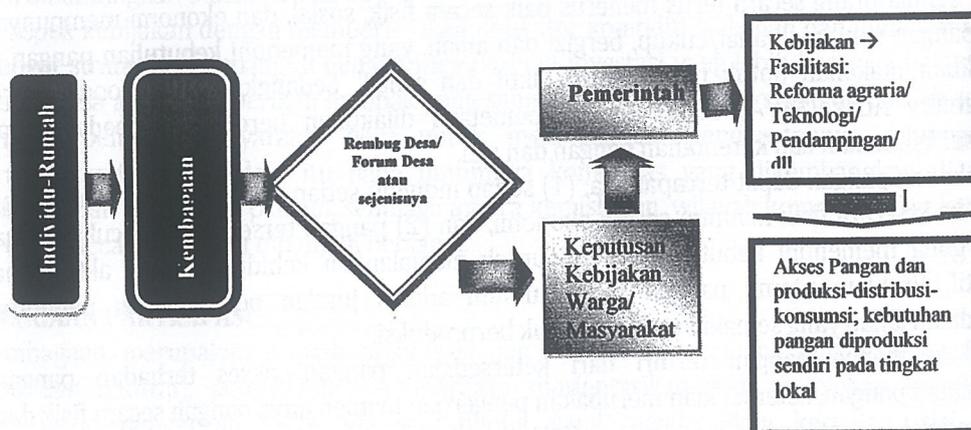
Pilar ketahanan pangan terdiri dari ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan, ketersediaan merupakan pengertian tersedianya pangan secara fisik dan akses pangan adalah kemampuan rumah tangga (RT) untuk memperoleh cukup pangan, sedangkan konsep pemanfaatan pangan merupakan penggunaan pangan oleh RT dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Konsep ketahanan pangan selain mempertimbangkan tiga

pilar tersebut, juga juga menghubungkan aspek-aspek tersebut dengan kepemilikan aset RT, strategi penghidupan, dan lingkungan politik, sosial, kelembagaan dan ekonomi, sehingga ketahanan pangan RT dan Individu ditentukan oleh interaksi dari faktor lingkungan pertanian (agro-environmental), politik, sosial ekonomi dan biologi.



Sumber: WFP, Januari 2009 dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2009

Secara esensial pangan merupakan kebutuhan dan hak asasi dasar setiap manusia, untuk mewujudkan dibutuhkan keterlibatan masyarakat (individu-rumah tangga-masyarakat) dalam membuat kebijakan terkait dalam pengadaan dan konsumsi pangan (produksi, distribusi dan konsumsi pangan). Undang-Undang No 7 tahun 1996 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan



Gambar 2.

Bagan Alir Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah dalam Penyediaan Pangan Lokal

merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi "hak asasi" setiap rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dari pengertian definisi tersebut sudah selayaknya keberhasilan program ketahanan pangan diorientasikan atas 2 (dua) prasyarat pokok, yaitu;

1. Diupayakan dengan meningkatkan pelibatan partisipasi masyarakat pada tingkat komunitas terendah (lokal). Masyarakat desa diberikan peluang sebesar-besarnya untuk memanfaatkan sumberdaya bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya,
2. Diupayakan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya pangan lokal.

Pemerintah harus memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk merancang dan mengembangkan sistem pangannya yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan kondisi alamiahnya dan fasilitasi (pengelolaan/ reform agraria, teknologi, pendampingan, dan sebagainya). Pembangunan pangan di tingkat masyarakat dapat diarahkan pada pembangunan wilayah yang komprehensif sesuai dengan perkembangan kearifan budaya lokalnya.

PENUTUP

Ada banyak individu dan kelembagaan lokal dengan inovasi dan kerja kerasnya telah menciptakan ketahanan pangan masyarakat di lingkungannya. Perlu dukungan pemerintah dalam mengembangkan pangan lokal untuk memperkuat kedaulatan pangan, upaya fasilitasi dalam bentuk pendampingan masyarakat, menemukan inovasi budidaya, serta teknologi pengolahan pangan. Sudah saatnya masyarakat terlibat secara langsung dalam menentukan kemandirian pangannya, yang didasarkan pada kemampuan wilayahnya dalam memproduksi pangan lokal.

Pemerintah juga harus mengurangi kebijakan mendatangkan produk pangan dari luar, dan mendorong pangan lokal sehingga akan menggairahkan pasar komoditas pangan daerah dan nasional. Pemerintah juga mendorong terwujudnya konsumsi pangan yang beragam, bernilai gizi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pangan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika. 2006. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Bustanul Arifin. 2007. *Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian*. PT. RajaGrafindo. Jakarta
- Fachrurrozie Sjarkowi. 2010. *Manajemen Pembangunan Agribisnis*. Baldad Grafiti Press. Palembang.
- Greg. Soetomo. 1997. *Kekalahan Manusia Petani*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Loekman Soetrisno, 2002. *Paradigma Baru Pembangunan Pertanian Sebuah Tinjauan Sosiologis*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Dewan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian RI dan World Food Programme (WFP). *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2009*.
- Tri Pranaji. 2003. *Menuju Transformasi Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.